



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Liberalisasi Perdagangan Produk Pertanian *World Trade*
***Organizations* dan Kebijakan Beras Indonesia Pada**
Periode Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Farhan Adipratama

2014330016

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Liberalisasi Perdagangan Produk Pertanian *World Trade*
***Organizations* dan Kebijakan Beras Indonesia Pada**
Periode Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

Skripsi

Oleh

Farhan Adipratama

2014330016

Pembimbing

Dr. Adelbertus Irawan J. H.

Bandung

2018



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

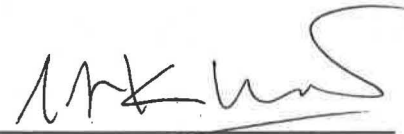


Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Farhan Adipratama
Nomor Pokok : 2014330016
Judul : Liberalisasi Perdagangan Produk Pertanian *World Trade Organizations* dan Kebijakan Beras Indonesia Pada Periode Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Pada Kamis, 19 Juli 2018 dan dinyatakan
LULUS

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Dr. Aknolt Kristian Pakpahan

: 

Sekretaris
Dr. Adelbertus Irawan J. H.

: 

Anggota
Giandi Kartasmita, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Farhan Adipratama
NPM : 2014330016
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Liberalisasi Perdagangan Produk Pertanian *World Trade Organizations* dan Kebijakan Beras Indonesia Pada Periode Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Juli 2018



Farhan Adipratama

ABSTRAK

Nama : Farhan Adipratama

NPM : 2014330016

Judul : Liberalisasi Perdagangan Produk Pertanian *World Trade Organizations* dan Kebijakan Beras Indonesia Pada Periode Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

Di Indonesia beras menjadi salah satu produk pertanian yang dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, beras perlu dikelola secara serius dan berkelanjutan oleh pemerintah dan masyarakat sendiri dengan adanya kebijakan domestik. Dalam penelitian ini, dilihat bahwa *World Trade Organizations* sebagai organisasi internasional telah berusaha untuk menstabilkan perdagangan yang terjadi diseluruh dunia agar perdagangan yang dilakukan dapat menguntungkan bagi Negara Maju maupun Negara Berkembang. WTO membentuk sebuah perjanjian komoditas pertanian baru yang telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh negara anggota *World Trade Organizations*, perjanjian tersebut bernama *Agreement on Agriculture*.

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran Liberalisme sebagai teori umum, Liberalisme Institusional sebagai teori pendekatan dan Konsep Ketahanan Pangan/*Food Security*. Penulisan penelitian dengan metode kualitatif ini merupakan penelitian berbasis dokumen dengan menggunakan teknik studi pustaka untuk menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimana kebijakan perdagangan *World Trade Organizations* berdampak terhadap kebijakan perdagangan beras periode Susilo Bambang Yudhoyono?” Penulis menemukan bahwa Kebijakan perdagangan WTO yang berbentuk AoA berdampak terhadap kebijakan perdagangan beras Indonesia karena menimbulkan positif dan negatifnya melakukan Liberalisme perdagangan.

Kata Kunci : Liberalisme, Liberalisme Institusional, Ketahanan Pangan/*Food Security*, *World Trade Organizations*.

ABSTRACT

Name : Farhan Adipratama

NPM : 2014330016

Title : Trade Liberalization of Agricultural Products by World Trade Organizations and Indonesian Rice Policy on The Period of Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

As one of the leading commodities, rice is an agricultural product which generate huge profits for Indonesia. Being the staple food of Indonesian society, the sustainable and management of rice policy should be the well maintained by the government also the society itself through the existence of the domestic policy. This research saw The World Trade Organizations efforts on trying to stabilize the trade that takes place around the world and making the trade became profitable for the Developed Country and Developing Countries. WTO established a new agricultural commodity agreement called Agreement on Agriculture that has been approved and signed by its member countries.

This study uses the framework of Liberalism as a general theory, the approach of Institutional Liberalism and the concept of Food Security. Using qualitative method, this research adopted document-based research using literature study techniques to collect the data also to answer the research question "How is the impact of World Trade Organizations trade policy on Indonesian rice trading policy on the period of Susilo Bambang Yudhoyono?" Authors found that WTO trade policy in the form of AoA gave an impact on trade policy of Indonesian rice commodity due to the positive and negative consequences of trade liberalism.

Keywords: Liberalism, Liberal Institutionalism, Food Security, World Trade Organizations.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Liberalisasi Perdagangan Produk Pertanian *World Trade Organizations* dan Kebijakan Beras Indonesia Pada Periode Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)”. Tulisan ini dipersembahkan oleh penulis guna memenuhi syarat kelulusan di Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung membantu penyelesaian skripsi ini. Rasa terimakasih yang utama penulis tujukan kepada Tuhan YME, serta kedua orang tua, adik dan dosen pembimbing skripsi, Mas Irawan atas segala masukan-masukan yang sangat bermanfaat dan untuk kesabarannya dalam membimbing penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Tidak lupa rasa terimakasih juga penulis tujukan kepada segenap teman-teman yang telah memberikan dukungan dan motivasi.

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi para pembacanya, dapat memberikan ilmu serta pemahaman terkait isu yang terjadi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan pada skripsi ini. Oleh karena itu segala kritik dan saran akan senang hati diterima oleh penulis demi menunjang perbaikan skripsi ini sehingga dapat berguna di masa yang akan datang.

Bandung, 9 Juli 2018

Farhan Adipratama

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Wasy-syukru Lillaah, Bismillahirrahmanirrahim berkat rahman dan rahim yang diberikan oleh **Allah Subhanahu Wa Ta'ala**, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah pemilik semesta alam skripsi ini dapat saya selesaikan, dan gelar sarjana dapat saya raih dalam waktu kurang lebih 4 tahun.

Terimakasih kepada, Papa **Bonier Achirwan Tarmat** dan Mama **Musharni Muslim Hasbullah** sebagai kedua orang tua yang telah membesarkan saya dari kecil sampai sebesar ini, serta tidak lupa adik kesayangan **Muhamad Fasya** yang selalu kerjaannya nongkrong tapi belajar juga rajin yang punya prinsip “Hidup mah harus balance bang “ Sukses ca di UPI nanti! Ditunggu kelulusannya! Tidak lupa juga keluarga terdekat saya yang selalu membantu kehidupan kuliah saya yaitu **Umi Ermalena MHS** dan **Wa ETTY Y Wilson** terimakasih! Nanti suatu saat aan akan balas kebaikan kalian jika aan sukses nanti! Tidak lupa juga untuk seluruh keluarga besar **H. Muslim Hasbullah** dan keluarga besar **H. Tarmat Widjaya** yang udah mendukung ketika awal aan harus masuk HI Unpar dan meyakinkan juga untuk masuk sini.

Terimakasih kepada, **Mas Irawan** yang sudah membimbing Farhan dari awal sampe akhir. Terimakasih juga udah sabar nangepin Farhan yang bisa keitung sampai sekarang masih suka salah pengertian apa yang diberi oleh mas ir (ya bisa dibilang lemot) haha. Sukses selalu mas! Jangan kapok ya bimbing Farhan!

Terimakasih kepada, Seluruh teman teman **HI UNPAR 2014!** Kalian *aselole jos lah pokokna mah!*. Teruntuk teman teman yang katanya “ Close Friend “ atau teman dekat saya selama di HI UNPAR digabungkan menjadi satu perkumpulan yang kita sebut ROGER 69 yaitu **Ari Budi Santosa, Djodi Fauzan Rahman, Egar M. Iqbal, Fahrian Aryasa Wardhana, Fahrizal Ahadisuryo, Fuad Aly Azmi, Farhan Muhammad, Frenza Adriandi N, M. Adam Garaudy, M. Ali Tanthowi, M. Armadhani Tririfky Rizaldy, M. Revin Syah, M. Reyhan Raharjo Putra, Reizka Dwidianto, Rizky Ramadhan P, Prana Alfarisi Suhud (pran yang tenang ya disana! Barudak sebagian udah pada lulus tinggal dikit lagi lah siga si egar tuman).** *Nuhun sadayana!* Tanpa kalian mungkin kehidupan kuliah ku akan garing kriuk seperti ranginang padahal jokes kalian terkadang garing juga tapi gapapa hehe. *Nuhun* Roger! Tidak lupa juga *ladies* roger **Berlinda Nefertiti, Febriyanthi Pingkan** dan **Jennifer Kencana** yang biasanya suka menjadi penengah dan menjadi Ibu untuk kami semasa kuliah.

Terimakasih kepada, **Keluarga Besar Divisi TATA TERTIB 2013-2014** dan **2014-2015** yang sudah bekerja sama dengan aan selama 2 periode. Kalian udah menambah kehidupan dikampus ini semakin gelap gulita tanpa arah karena dengan kesibukan yang super padat tidak bisa dibendung (*buset bahasanya ribet amat*)

Pokoknya terimakasih sekali lagi dan tetep pada slogan ya **YOU KNOW WHAT YOU GET IF YOU BREAK THE RULES! TATIB TATIB TATIB!**

Terimakasih kepada, Delegasi **International Committee of the Red Cross (ICRC) Fahrian Aryasa, Salsa Nayuni Wigati dan Safira Situmorang**. Walau delegasi yang kita dapet tidak sejalan dengan sidang prakdip (ngaco sendiri) tapi kita tetep bisa *survive!* Hahahaha makasih kalian semua udah mau menghabiskan satu semester bersama dalam suka dan duka di semester 6! Ditunggu makan makan selanjutnya! Sukses terus!

Terimakasih kepada, Anak Bimbingan Mas Irawan, **Alya Atila, Maria Claudia dan Joel Caesar!** Terimakasih sudah bareng selama bimbingan dan mau di tanya tanyain sama aan heueheue tanpa kalian mungkin sudah halu ini bimbingan haha

Terimakasih kepada, Teman teman dekat saya diluar kampus yang selalu mengisi kehidupan selama 4 tahun ini, **Widya, Nova, Melza!** Makasih ya udah datang ke siding aan kemarin dengan segala barang bawaannya! Thankyou sangat!

Terimakasih kepada, SEMUA PIHAK yang tidak bisa disebutkan satu persatu lagi. Pokoknya terimakasih banyak sudah membantu kehidupan kuliah aan ini!

Akhir kata di tutup dengan pantun,

Jalan Jalan ke medan
Eh ketemu sama si asih
Saya Farhan
Ucapkan Terimakasih

DAFTAR ISI

Abstrak	i
<i>Abstract</i>	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terimakasih	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Grafik	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Singkatan	xii
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.2.1 Pembatasan Masalah	8
1.2.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9

1.3.2 Kegunaan Penelitian	10
1.4 Kajian Literatur	10
1.5 Kerangka Pemikiran	13
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	18
1.6.1 Metode Penelitian	18
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	18
1.7 Sistematika Pembahasan	19
II. Kebijakan Pangan <i>World Trade Organizations</i>	20
2.1 Liberalisasi Produk-Produk Pertanian	32
2.2 Respon Negara-negara Maju Terhadap <i>Aggrement On Agriculture</i>	35
III. Kebutuhan dan Sumber Beras Berdasarkan Jumlah Populasi di Indonesia	39
3.1 Populasi Masyarakat Indonesia Sebagai Sumber Permintaan akan Beras	39
3.2 Kebutuhan Beras Indonesia	41
3.2.1 Data Produksi, Konsumsi dan Impor Beras	41
3.3 Sumber Beras Indonesia	46
3.3.1 Produksi Beras Indonesia	46
3.3.2 Alih Fungsi Lahan	50

3.4 Praktek Pengelolaan Beras	53
3.4.1 Ekspor	53
IV. Kebijakan Beras di Indonesia	56
4.1 Kebijakan Perdagangan Periode Susilo Bambang Yudhoyono	57
4.2 Impor	61
4.3 Pandangan Tentang Kebijakan Pemerintah	63
4.4 Perbandingan Kebijakan Periode Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati dan Abdurrahman Wahid	67
V. Kesimpulan dan Saran	75
Daftar Referensi	81

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	43
Grafik 3.2	44

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	42
Tabel 4.1	70
Tabel 4.2	70
Tabel 4.3	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	40
Gambar 3.2	40

DAFTAR SINGKATAN

AFTA	<i>Asean Free Trade Area</i>
AMAF	<i>ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry</i>
AMS	<i>Aggregate Measure of Support</i>
AoA	<i>Agreement on Agriculture</i>
ASEAN	<i>Association of South East Asia Nations</i>
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
Bulog	Badan Urusan Logistik
CIF	<i>Cost, Insurance and Freight</i>
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
FAA	<i>Food Availability Approach</i>
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>

GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
GKG	Gabah Kering Giling
IBRD	<i>International Bank Recontruction and Development</i>
IMF	<i>International Monetary Found</i>
ITO	<i>International Trade Organizations</i>
JK	Jusuf Kalla
KB	Keluarga Berencana
Kemendag	Kementerian Perdagangan
KIB	Kabinet Indonesia Bersatu
KLUI	Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia
MFN	<i>Most Favoured Nations</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
RPPK	Revitalisasi Pertanian Perikanan Kehutanan
SBY	Susilo Bambang Yudhoyono
SPI	Serikat Petani Indonesia

UU Undang-Undang

WTO *World Trade Organizations*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Situasi dan kondisi dunia diabad ke-21 ini dicerminkan dengan gencarnya arus globalisasi dengan meningkatnya interaksi antar masyarakat di dunia. Perkembangan dibidang teknologi transportasi dan telekomunikasi menjadi salah satu faktor utama dibalik terciptanya saling keterkaitan antar masyarakat dan negara-negara di dunia yang secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kerja sama diantara mereka yang selanjutnya terjadi sebuah saling ketergantungan antar negara-negara di dunia.¹ Saling berhubungan dan berkaitan antar masyarakat dunia ini, memberikan perubahan pada pola interaksi antar individu, Negara, dan Sistem Internasional. Salah satu isu yang mulai menjadi pembahasan utama setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2 adalah isu ekonomi (perdagangan) untuk memulihkan kondisi kehidupan di berbagai negara sehabis perang. Hal tersebut dikarenakan adanya kepercayaan bahwa dengan membuka akses perekonomian dan perdagangan akan mendorong komunikasi dan kerja sama antar negara yang selanjutnya akan menciptakan kondisi dunia yang lebih damai.

¹ Wolf Martin, *Shaping Globalization*, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2014/09/pdf/wolf.pdf>, diakses pada tanggal 17 September 2017.

Upaya negara-negara di dunia untuk memperlancar Perdagangan Internasional tersebut dilakukan melalui proses-proses deregulasi, liberalisasi perdagangan, serta membentuk kesepakatan perdagangan multilateral seperti GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang sejak tahun 1994 berubah menjadi WTO (*World Trade Organization*) dan AFTA (*Asean Free Trade Area*). Sektor pertanian yang merupakan sektor andalan bagi kebanyakan Negara Berkembang pun ikut masuk kedalam agenda perdagangan bebas yang pertama kali dibahas didalam forum WTO. Kesepakatan mengenai liberalisasi pada sektor agrikultur tersebut tertuang didalam kesepakatan yang bernama *Agreement on Agriculture* (AoA) yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota WTO termasuk juga Indonesia.

Pengertian pertanian itu sendiri telah berkembang dari yang hanya diartikan sebagai proses budidaya tanaman untuk pangan saja menjadi mencakup pengertian pembudidayaan makhluk non-tanaman seperti ikan, ternak, dan tanaman non-pangan. Pertanian terbagi menjadi delapan subsektor, antara lain Subsektor Tanaman Pangan, Subsektor Perkebunan, Subsektor Peternakan, Subsektor Jasa Pertanian dan Peternakan, Subsektor Kehutanan, Subsektor Perburuan atau Penangkapan dan Penangkaran Satwa Liar, Subsektor Perikanan Laut dan Subsektor Perikanan Darat. Sektor Pertanian merupakan sektor utama bagi Indonesia dimana pada tahun 2000 sektor ini menyerap tenaga kerja sebesar 45.1%, hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memainkan peran yang penting didalam Perekonomian Indonesia. Mayoritas masyarakat pedesaan di Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian ini yang merupakan penggerak

perekonomian rakyat pedesaan pada basis industri kecil dan menengah.² Sedangkan dalam Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) pada tahun 2005 disebutkan juga bahwa sektor pertanian merupakan sektor nomor satu di Indonesia.³

Asia tetap masih mendominasi dalam bidang produksi, konsumsi dan perdagangan beras dunia. Produksi padi Indonesia mengambil pangsa sekitar 9% dari total produksi dunia. Indonesia negara penghasil beras ke tiga terbesar di dunia, setelah China (30%) dan India (21%). Namun, ke dua negara terakhir adalah eksportir beras, berbeda dengan Indonesia yang mejadi negara importir beras sejak akhir 1980-an. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang menghadapi masalah pertanian, khususnya masalah pangan, dimana pada tahun 1984-1986 Indonesia pernah menjadi swasembada beras sedangkan sekarang menjadi negara pengimpor beras.

Tahun 2005 Indonesia merupakan negara peringkat ketiga sebagai produsen padi terbesar setelah China dan India. Hal ini menunjukkan betapa besarnya hasil padi yang dihasilkan oleh Indonesia pada waktu itu. Indonesia sempat menjadi salah satu negara produsen padi terkemuka di dunia. Di tahun 2014, Indonesia menjadi produsen beras terbesar di dunia setelah China dan India. Tetapi beberapa tahun terakhir Indonesia perlu mengimpor sekitar 3 juta ton beras setiap tahunnya, terutama dari Thailand dan Vietnam, untuk mengamankan cadangan beras negara.

² Muhammad Ikhwan, *Usir WTO dari Pertanian: Perjuangan Rakyat Menuju KTM VII WTO*, <http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2010/07/Booklet-SPI-Usir-WTO-dari-pertanian.pdf>, diakses pada tanggal 17 September 2017.

³ Badan Pusat Statistik, *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2005*, <https://sirusa.bps.go.id/webadmin/doc/KBLI2005.pdf>, diakses pada tanggal 17 September 2017.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah membuka keran impor beras pada tahun 2018. Sebanyak 500.000 ton beras akan diimpor dari Vietnam dan Thailand. Kebijakan impor beras dilakukan untuk menambah stok beras yang akhir-akhir ini mengalami penurunan. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia selalu mengimpor beras mulai dari tahun 2000 hingga 2015 atau selama 15 tahun. Sementara, pada tahun 2016 sampai 2017 pemerintah berhenti sementara untuk mengimpor beras dan pada 2018 Indonesia kembali mengimpor beras. Selama 15 tahun tersebut, Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 15,39 juta ton beras dengan volume impor beras terbanyak pada tahun 2011 dengan volume sebesar 2,75 ton, sedangkan volume terkecil pada tahun 2005 sebesar 189.616 ton. Sehingga, dengan jumlah total impor beras tersebut dan ditambah 500.000 ton pada tahun ini, maka hingga saat ini Indonesia telah mengimpor beras sebesar 15,89 juta ton. Sementara, dari sisi dana yang dikeluarkan pada impor beras sebesar 15,39 juta ton mencapai 5,83 miliar dollar AS atau Rp 78,70 triliun (kurs Rp 13.500).⁴

Di Indonesia beras menjadi salah satu produk pertanian yang dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar untuk Indonesia. Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia yang perlu dikelola secara serius dan berkelanjutan oleh pemerintah dan masyarakat sendiri. Beras tidak hanya dijadikan sebagai makanan, melainkan juga dijadikan sebagai sumber pendapatan Negara didukung dengan keadaan Indonesia yang agraris. Pemanfaatan dan pengelolaan

⁴ Fauzi, Achmad. *Begini Perjalanan Impor Beras Indonesia Sejak Tahun 2000 hingga 2018*. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/16/161052826/begini-perjalanan-impor-beras-indonesia-sejak-tahun-2000-hingga-2018> diakses pada 7 Juli 2018.

beras telah lama diatur pemerintah dan telah mengalami berbagai perubahan dan perbaikan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat mengenai beras di Indonesia disusun sedemikian rupa oleh wakil rakyat yang duduk di parlemen. Pengambilan keputusan juga dilakukan berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan. Namun, kondisi masyarakat, perkenomian, sosial, politik dan keadaan internasional yang tidak seterusnya stabil sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam negeri yang dilakukan pemerintah.

Keadaan didalam masyarakat sendiri juga mempengaruhi penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pengelolaan beras Indonesia. Tingkat produksi dan konsumsi beras ditentukan oleh masyarakat. Dengan menganalisa keadaan-keadaan yang ada pemerintah menyusun kebijakan dan mengambil keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berkaitan juga dengan kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan suatu Negara dengan Negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan ekspor-impor tersebut dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan didalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Ekspor-impor yang dilakukan sangat berpengaruh terhadap masyarakat negara. Sehingga ekspor-impor beras bukanlah hal yang dapat dilakukan kapanpun dan oleh siapapun. Dalam hal ini, andil pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan situasi yang stabil terutama menyangkut pangan masyarakat. Pangan menjadi hal yang krusial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sehingga rawan memicu konflik dalam negeri.

1.2 Identifikasi Masalah

Sektor Pertanian merupakan sektor utama bagi Indonesia dimana pada tahun 2000 sektor ini berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 45,1%. Mayoritas masyarakat pedesaan di Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian ini. Komoditas pertanian ini tidak hanya diproduksi oleh Indonesia yang merupakan salah satu contoh negara berkembang, dimana Negara Maju juga memproduksi komoditas yang serupa.

Kekuatan perekonomian yang dimiliki oleh Negara Maju menjadikan produk mereka dapat lebih unggul dibandingkan dengan komoditas pertanian yang diproduksi oleh Negara Berkembang. Negara Maju yang sejak awal memiliki *Initial Tariff Rate* tentu mempersulit Negara Berkembang untuk mengakses pasar Negara Maju. Selain itu dengan kekuatan subsidi dari Pemerintah di Negara Maju yang menjadikan produk pertanian mereka jauh lebih murah sehingga laku dipasaran.

World Trade Organizations telah berusaha untuk menstabilkan perdagangan yang terjadi diseluruh dunia agar perdagangan yang dilakukan dapat menguntungkan bagi Negara Maju maupun Negara Berkembang. Sangat disayangkan, segala perjanjian yang sudah disepakati oleh negara-negara anggota organisasi ini tidak pernah terlaksana dengan baik. *Punta Del Este* yang kemudian dikenal dengan Putaran Uruguay menjadi sebuah langkah awal yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia untuk menata Perdagangan Internasional dengan mencegah meningkatnya proteksionisme di negara-negara maju. Namun perjanjian yang telah disepakati tidak benar-benar dilakukan oleh negara-negara yang

bersangkutan. Kemudian dibentuklah sebuah perjanjian komoditas pertanian baru yang telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh negara anggota *World Trade Organizations*, perjanjian tersebut bernama *Agreement on Agriculture*.

Agreement on Agriculture ini memiliki tiga pilar, yang masing-masing pilarnya dapat memperbaiki alur perdagangan internasional komoditas pertanian. Pilar pertama mengenai Akses Pasar, pilar kedua mengenai Subsidi Domestik dan pilar ketiga mengenai Subsidi Ekspor. Untuk yang kesekian kalinya, perjanjian ini tidak benar-benar dilaksanakan oleh Negara Maju. Negara Maju tetap melakukan proteksionisme terhadap produk yang diproduksinya, memberikan subsidi kepada produknya, semua berakhir pada gagalnya Negara Berkembang bersaing di Pasar Internasional.

Indonesia yang merupakan salah satu Negara Berkembang dan pertanian menjadi komoditas utama yang diproduksi menjadi rugi apabila harus bersaing dengan produk-produk pertanian yang berasal dari Negara Maju. Beras menjadi salah satu contoh produk pertanian yang diungguli oleh Negara Indonesia. Walau kebijakan liberalisasi pertanian ini tidak efektif yang merujuk kepada impor dari salah satu bidang pertanian yaitu beras akan tetapi dari impor itu sendiri mempunyai keuntungan dalam hal lain adalah mendapatkan harga beras dengan murah dari luar negeri dan menghemat waktu pembuatan beras di domestik.

1.2.1. Pembatasan Masalah

Tulisan ini akan dibatasi pada Kebijakan Beras Indonesia dan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri yang ditetapkan oleh *World Trade Organizations*. Kedua batasan tersebut akan coba dikolaborasikan oleh penulis untuk menjawab *Research Questions* atas penelitian ini. Penelitian akan berfokus pada praktek pengelolaan beras Indonesia (Produksi, Konsumsi, Impor, Ekspor Beras), Alih fungsi lahan, serta Dampak Implementasi Kebijakan Liberalisasi Produk-Produk Pertanian oleh WTO. Selain itu pembahasan akan difokuskan pada kurun waktu 2004-2014 dikarenakan peneliti ingin membahas ekspor-impor beras pada masa periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

1.2.2. Perumusan Masalah

Penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

“Bagaimana dampak kebijakan perdagangan *World Trade Organizations* terhadap kebijakan perdagangan beras Periode Susilo Bambang Yudhoyono? ”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah supaya pembaca dapat memahami dengan betul Kebijakan Beras di Indonesia dan Kebijakan luar negeri Republik Indonesia oleh *WTO* sebagai badan organisasi yang mempengaruhinya. Penulis akan membahas mengenai bagaimana dampak ekspor impor beras terhadap situasi beras domestik. Untuk memahami tulisan ini, penulis menyajikan informasi secara sistematis dimana akan ada bagian yang memaparkan teori yang digunakan untuk menganalisa fenomena dalam kasus ini, bagian pertama menjelaskan mengenai tingkat produksi dan kebutuhan beras masyarakat Indonesia, dalam bagian kedua dijelaskan impor beras Indonesia, bagian ketiga berisi kebijakan-kebijakan beras yang berlaku di Indonesia, dan bagian terakhir akan berisi mengenai pengelolaan beras di Indonesia yang menjelaskan bagaimana kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan Indonesia dalam berbagai situasi dan bagaimana alih fungsi lahan berpengaruh terhadap perdagangan dan pemenuhan beras domestik. Serta penulis ingin pembaca dapat memahami bahwa Liberalisasi Perdagangan beras di Indonesia dapat menguntungkan dan dapat merugikan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penulis bertujuan agar pembaca, terutama masyarakat Indonesia mampu mengerti dan memahami mengapa pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan ekspor dan impor beras. Kemudian, penulis juga berharap masyarakat dapat mengerti apa dampak kegiatan ini dan dapat meningkatkan pemanfaatan atas dampak yang muncul. Penulis ingin menyajikan informasi yang baik bagi para pembaca mengenai jumlah produksi dan konsumsi beras Indonesia, kebijakan apa saja yang membatasi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, serta apa saja situasi yang mempengaruhi perdagangan beras domestik. Penulis juga berharap penulisan ini dapat berguna bagi para peneliti selanjutnya yang berminat atau yang sedang meneliti permasalahan beras Indonesia terutama mengenai ekspor-impor beras. Selain itu kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa pengaruh yang diberikan oleh organisasi (*WTO*) terhadap kebijakan perdagangan luar negeri dan kebijakan dalam negeri Republik Indonesia.

1.4 Kajian Literatur

Penulis menyadari perlu adanya kajian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini sebagai referensi. Terdapat dua buah referensi yang telah penulis kaji guna mendukung penelitian mengenai Liberalisasi Perdagangan dan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Republik Indonesia

Kajian pertama berbentuk Jurnal tentang *Trade Agreements*

Jurnal *International Journal of Economics and Financial Issues* yang di kolaborasikan oleh beberapa penulis antara Lain adalah Bounlert Vanhnalat, Phouphet Kyophilavong, Alay Phonvisay, Bouason Sengsourivong mengatakan bahwa *Free Trade Agreements* memberikan keuntungan jangka panjang dalam hal keuntungan kesejahteraan dan efisiensi yang lebih besar dalam alokasi sumber daya. Di sisi lain, efek negatif bisa terjadi dalam jangka pendek bila produsen dalam negeri tidak siap menghadapi persaingan yang ketat. Konsep penciptaan perdagangan dan pengalihan perdagangan disorot oleh beberapa ekonom termasuk Salvatore (2007), yang menyarankan bahwa "penciptaan perdagangan terjadi ketika beberapa produksi dalam negeri di negara yang merupakan anggota FTA digantikan oleh produksi yang lebih efisien dari negara-negara anggota lainnya"⁵

Akibatnya, ini akan menyebabkan lebih banyak spesialisasi dalam produksi dan peningkatan kesejahteraan konsumen negara-negara anggota. Di sisi lain, "pengalihan perdagangan terjadi ketika impor dengan biaya rendah dari non-anggota digantikan oleh biaya impor yang lebih tinggi dari anggota FTA"⁶ Jurnal ini akan dikaitkan dengan Liberalisasi Perdagangan yang didalamnya akan membahas apakah menguntungkan atau membuat kerugian jika melakukan kegiatan Liberalisasi ini dengan beberapa argumen yang sudah di jelaskan di jurnal tersebut.

⁵ *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2011. Halaman 341

⁶ *Ibid.* Halaman 343

Kajian kedua berbentuk Jurnal tentang Ketahanan Pangan

Masalah ketahanan pangan telah menjadi subjek prioritas dalam ASEAN untuk beberapa waktu. Para menteri ASEAN Pertanian dan Kehutanan (AMAF) mengawasi upaya koperasi di bidang pangan, pertanian, dan kehutanan di wilayah tersebut. Dan telah mendirikan beberapa area prioritas: untuk mempromosikan sektor pangan, pertanian dan kehutanan. Di antara mereka, memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut telah menjadi prioritas. Hal ini karena kejadian gizi buruk di Asia, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memperkirakan, Asia menyumbang hampir dua-pertiga dari kekurangan gizi kronis di dunia. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa pada tahun 2010, Asia akan mencapai setengah dari penduduk kekurangan gizi di dunia.⁷

Salah satu kebijakan ASEAN adalah mengadakan perdagangan beras ASEAN untuk menyediakan platform bagi anggota ASEAN untuk berbagi dan menganalisa informasi pasar beras, dan mengkoordinasikan tindakan kebijakan dalam mengurangi dampak buruk dari volatilitas harga beras. Melalui forum anggota dapat membahas langkah-langkah untuk membuat perdagangan beras regional yang lebih terbuka, mengembangkan insentif untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam rantai nilai beras regional, dan menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas padi.⁸

⁷ Than, Mya. *ASEAN beyond the Regional Crisis: Challenges and Initiatives*. Institute of Southeast Asian Studies, 2001.

⁸ Bank, Asian Development. *Food Security in Asia and the Pacific*. Asian Development Bank, 2013.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas dengan dikaitkan menggunakan Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia tidak hanya kebijakan didalam negeri saja dengan melihat keuntungan dan kerugian untuk melakukan Liberalisasi Perdagangan terutama terhadap beras Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Didalam bagian ini akan disuguhkan beberapa teori dan konsep antara lain adalah Teori Liberalisme sebagai teori umum, Teori Liberalisme Institusional sebagai teori pendekatan dari teori umum serta penulis akan menggunakan konsep Ketahanan Pangan/*Food Security*. Yang pertama akan dibahas oleh penulis adalah Teori Liberalisme oleh Martin Griffiths (1999) dan Robert Jackson dan Georg Sorensen (2007). Paradigma liberalisme sebagai teori umum melihat bahwa hubungan internasional sebagai sebuah wilayah yang dinamis dan memiliki potensi untuk berubah dari waktu ke waktu. Liberalisme menghargai kebebasan individu, oleh sebab itu perlu adanya batasan-batasan bagi negara agar tidak menciderai kebebasan, khususnya kebebasan pada tataran individu tersebut. Hal ini tentu saja berbeda dengan pandangan realisme. Untuk cakupan domestik suatu negara yang menganut hukum liberal, pemerintah dibatasi oleh akuntabilitas demokratis.⁹ Yang perlu diperhatikan, pada dasarnya liberalisme menitikberatkan pada *human nature*

⁹ Martin Griffiths, *"Fifth Key Thinkers in International Relations"*, (London: Routledge, 1999), halaman 51.

yang positif sehingga pandangan ini percaya bahwa prinsip-prinsip rasional dapat diaplikasikan dalam lingkup internasional melalui adanya kerjasama.¹⁰

Berangkat dari teori umum tersebut, penulis mengambil pendekatan yang lebih spesifik dalam melihat kasus yang diteliti yaitu pendekatan Liberalisme Institusional oleh Robert O. Keohane and Lisa L. Martin. (1995) dan Martin Griffiths (1999). Pandangan ini melihat bahwa institusi internasional memiliki dampak yang positif dan berguna. Teori liberalisme institusional merupakan teori yang membahas mengenai organisasi internasional dan lembaga yang dapat membantu dalam kerjasama antarnegara.¹¹ Liberalisme institusionalis tidak mengabaikan anarki dalam sistem internasional, liberalisme institusional memandang dibalik adanya anarki dalam sistem internasional tersebut dapat terlaksana sebuah kerjasama antarnegara dan hubungan antarnegara. Teori ini berpendapat bahwa dalam sistem internasional yang anarki terdapat hubungan antarnegara yang kooperatif untuk mengatur jalannya sistem internasional tersebut.¹² Dalam teori liberalisme institusional mengutamakan demokrasi dalam hubungan antar negara. Bagaimana sebuah negara dalam mencapai kepentingannya menggunakan demokrasi lewat diplomasi.

Negara-negara tersebut saling membagi kepentingannya demi tercapai kerjasama yang terwujud dalam kesepakatan bersama. Hal tersebut tercapai lewat

¹⁰ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *“Introduction to International Relations: Theories and Approaches – Fifth Edition”*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), halaman 100-101.

¹¹Robert O. Keohane and Lisa L. Martin. (1995)*The Promise of Institutional Theory. International Security*, Vol. 20, NO. 1 (Summerr: 1995), hlm. 42

¹² Ibid.

share of interest dengan jalur diplomasi antara wakil-wakil negara. Lahirnya liberal institusionalisme merupakan tandingan dari realisme yang berpandangan bahwa negara merupakan aktor yang enggan bekerjasama dan mementingkan kepentingan individu dan mengabaikan kerjasama dalam pencapaian kepentingan negara.¹³ Negara pada hakikatnya memiliki interaksi berkelanjutan satu sama lain dan menurut pendekatan ini ialah dengan cara menjalin kerjasama walaupun berada pada lingkungan yang bersifat anarki. Interaksi yang berkelanjutan memungkinkan bagi negara untuk membentuk institusi internasional. Dengan adanya institusi internasional maka dapat tercipta solusi yang efisien atas suatu permasalahan yang memang menjadi ranah dari organisasi atau institusi internasional yang spesifik.

Organisasi internasional dalam pandangan tokoh-tokoh liberal institusional merupakan kumpulan aturan yang mengatur perilaku negara dalam lingkup tertentu. Lingkup tertentu dalam hal ini biasa disebut dengan istilah rezim. Untuk cakupan dari organisasi internasionalnya pun beragam, dapat bersifat universal maupun regional. Di sini organisasi internasional hadir untuk membantu mempromosikan kerjasama antarnegara dan sekaligus juga mengatasi permasalahan rendahnya tingkat kepercayaan antarnegara yang merupakan permasalahan tradisional dalam konteks anarki.¹⁴

Konsep berikutnya yang akan dibahas oleh penulis adalah *Food Security / Ketahanan Pangan* oleh William D. Schanbacher (*“The Politics of Food”*). Konsep

¹³ Martin Griffiths (1999) *Fifty Key Thinkers in International Relations*. London: Routledge, hlm. 53, 75

¹⁴ *Ibid*, halaman 110-113.

ketahanan pangan mulainya berkembang pada tahun 1970 bersamaan dengan adanya krisis pangan dan kelaparan dunia terutama pada kawasan Asia dan Afrika. Awalnya ketahanan pangan hanya terfokus pada penyediaan pangan pada tingkat nasional maupun internasional terutama padi-padian. Sehingga pada awal masa orde baru kebijakan ketahanan Indonesia didasarkan pada penyediaan pangan yang lebih dikenal dengan istilah *Food Availability Approach* (FAA).

Dari perspektif sejarah istilah ketahanan pangan muncul karena adanya krisis pangan dan kelaparan (Reutlinger 1982 dalam Maxwell & Frankenberger 1992). Istilah ketahanan pangan pertama kali digunakan pada tahun 1971 oleh PBB untuk membebaskan dunia terutama negara–negara berkembang dari krisis produksi dan krisis suplai makanan pokok. Fokus ketahanan pangan pada masa itu menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pokok dan membebaskan daerah dari krisis pangan.¹⁵ Sedangkan menurut Dewan Ketahanan Pangan (2009) dalam membentuk ketahanan pangan didasarkan pada aspek terkait yaitu, tersedianya pangan secara fisik di daerah yang diperoleh dari produksi domestik, impor/perdagangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan lebih ditentukan dari produksi domestik, adanya akses pangan atas unsur kemampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan cukup, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan maupun dari kelimanya, pemanfaatan pangan dapat dilihat dari penggunaan pangan oleh rumah tangga dan

¹⁵ Pieris, Karen W.Dinly., “Ketahanan dan Krisis Pangan dalam Perspektif Malthus, Depedensi dan Gender (Women in Development)”. Jurnal Hubungan Internasional Tahun VIII, No.1, (2015) <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jhi6e16f5e39ffull.pdf>, diakses pada 07 Juli 2018.

kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Konsep pendekatan yang sama juga digunakan dalam membangun ketahanan pangan melalui keterjangkauan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal, keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Ketahanan pangan merupakan isu yang serius bagi Negara Negara berkembang di Asia Tenggara. Keamanan pangan bisa memancing timbulnya kerawanan pangan dimana suatu daerah tidak memiliki pangan yang cukup.¹⁶ Dengan adanya kerawanan pangan maka akan terjadi kenaikan harga pangan yang terus melambung dan bisa membahayakan ketahanan pangan bagi negara negara asia tenggara dan bukan tidak mungkin memberikan dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat dan memperburuk tingkat kekurangan gizi masyarakat dan kemiskinan yang ada di kawasan Asia Tenggara. Teori ini bilang bahwa ketahanan pangan disebuah dinegara dapat mempengaruhi hal yang lainnya seperti ekonomi sebuah negara, sosial budaya.¹⁷ Sebagai contoh Isu ketahanan pangan tidak bisa dijadikan isu yang di abaikan, tingginya kerusakan kerusakan pangan sangat mengancam kawasan negara negara asia tenggara, bisa dilihat dari data bahwa sawah yang rusak di ASEAN pada tahun 2014 dilaporkan sekitar 1,10 juta

¹⁶ William D. Schanbacher “ *The Politics of Food* ” halaman 35-38

¹⁷ *Ibid.*

hektar yang 0,50 juta hektar atau sekitar 45 persen yang disebabkan oleh banjir dan 0,37 juta hektar atau sekitar 33 persen yang disebabkan oleh kekeringan.¹⁸

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan teknik sistematis dan intuitif penelitian dalam membantu sarjana maupun praktisi dalam menghasilkan pengetahuan dengan langkah yang efisien dan memiliki koherensi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh teknik empiris dalam merancang dan melakukan sebuah penelitian.¹⁹

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam mengumpulkan data, penelitian akan dilakukan menggunakan pengumpulan melalui studi pustaka dan literatur. Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari artikel media informasi (cetak dan non-cetak), laporan resmi dari penelitian, jurnal ilmiah, buku atau tulisan yang memiliki relevansi sesuai dengan topik penelitian yang akan diangkat.

¹⁸ Ulrich Koester, "Regional Cooperation To Improve Food Security In Southern and Eastern African Countries," *International Food Policy Research Institute*, n.d.

¹⁹ Profesor John C. King, "Qualitative Research Methods in International Affairs for Masters Students", *American University*, 2011, http://www.american.edu/sis/faculty/upload/2011SP-SIS-680-001_King.pdf, diakses pada 10 Oktober 2017.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini akan terdiri dari 5 bab, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan penelitian yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian literatur, kerangka berpikir, dan metodologi penelitian dan teknik pengumpulan data.

Bab II akan membahas tentang kebijakan pangan WTO.

Bab III akan membahas Kebutuhan dan Sumber Beras berdasarkan jumlah populasi di Indonesia

Bab IV akan membahas Kebijakan Beras di Indonesia.

Bab V akan menyimpulkan dan memberikan saran untuk pembahasan – pembahasan yang dilakukan pada bab IV yang didukung oleh perolehan data dari Bab II dan Bab III, sekaligus menjawab pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah yang telah dipaparkan pada Bab I.